



**Determinan Pengungkapan Keberlanjutan:  
Studi Empiris pada Entitas Publik Sektor Manufaktur di Indonesia**

**Laura Shafannissa Sugma<sup>1</sup>, Dharma Tintri Ediraras<sup>2</sup>, Ghina Nurjihhan<sup>3</sup>, dan Adila Kurnia Dewi Permata Sari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi,

<sup>1</sup>Program Sarjana (S1) Akuntansi

<sup>2</sup>Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi

<sup>3,4</sup>Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi

\*Korespondensi : [dharmate@staff.gunadarma.ac.id](mailto:dharmate@staff.gunadarma.ac.id)

**Article Info**

Article history:

Received: 12 Februari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: diisi oleh editor

**Abstrak**

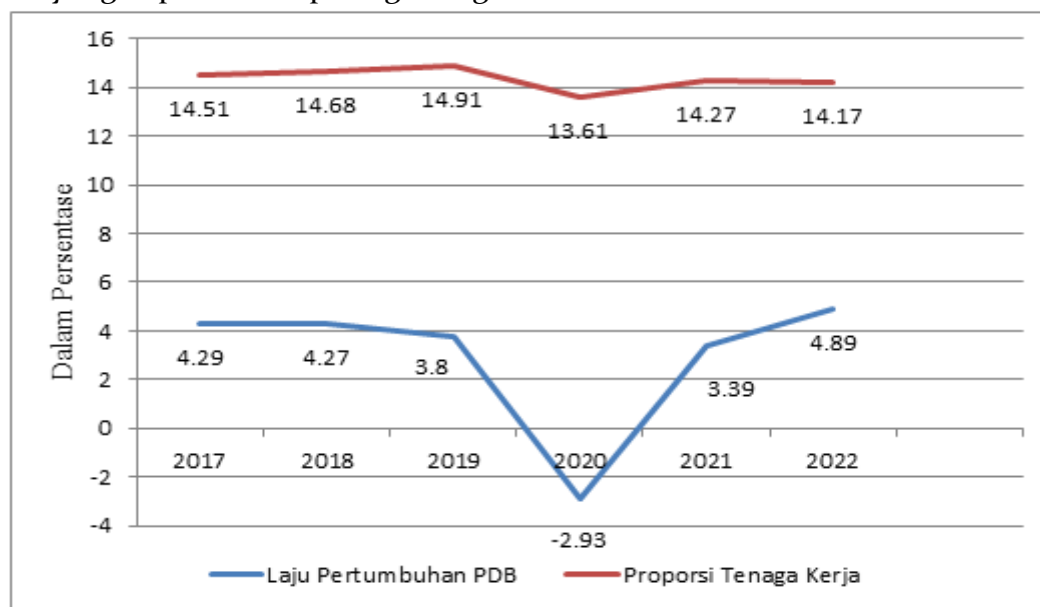
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sebelum pandemi dan saat pandemic, dan dampak parsial maupun simultan kinerja keuangan, ukuran entitas publik, tata kelola entitas publik terhadap pengungkapan keberlanjutan pada entitas publik sektor manufaktur di Indonesia. Data sekunder berupa laporan tahunan periode 2017 sd 2022, yang diperoleh melalui laman masing – masing entitas, lalu diolah dan dianalisa secara statistik deskriptif dan uji hipotesis penelitian dilakukan dengan uji beda dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan berbeda signifikan sebelum pandemi dan saat pandemi sedangkan variabel lainnya tidak. Secara parsial, perputaran persedian adalah determinan pengungkapan keberlanjutan, walaupun relatif lemah pengaruhnya. Rasio keuangan, ukuran entitas dan komite audit secara simultan berpengaruh (moderat) terhadap pengungkapan keberlanjutan.

**Kata Kunci :** *rasio keuangan, komite audit, ukuran entitas, pengungkapan keberlanjutan dan entitas publik sektormanufaktur.*

## PENDAHULUAN

Pandemi covid – 19 (C19) di Indonesia merupakan bagian dari penyakit corona virus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif covid – 19 di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 maret 2020. Kasus ini berawal dari pertemuan wanita berumur 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Kasus positif C19 di Indonesia mencapai 8.607 kasus dan sudah menyebar ke 34 provinsi dengan kasus terbanyak yaitu di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pandemi C19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Terjadinya pandemi C19 pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dapat menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas terutama pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang mengalami tantangan terbesar pada saat pandemi, dimana pertumbuhan produk domestik bruto dan proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur selama tahun 2017 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang dapat dilihat pada grafik gambar 1. dibawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2023).

**Gambar 1. Grafik Pertumbuhan PDB dan Proporsi Tenaga Kerja Sektor Manufaktur Tahun 2017 – 2022**

Suatu upaya dalam mengatasi dampak pandemi C19 terhadap tenaga kerja di Indonesia yaitu salah satunya dengan cara memberikan program kartu prakerja dan subsidi gaji melalui percepatan pengesahan dan penerapan Omnibus Law (Citra, Bierneta, Puspamurti & Pimada, 2020).

Sementara itu, kebijakan entitas publik untuk mengungkapkan keberlanjutan masih sukarela, skeptisnya adalah entitas publik kurang memperhatikan pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu belum sepenuhnya berkomitmen untuk

menjadi entitas publik dengan tata kelola yang baik dan entitas publik menganggap bahwa dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan terdapat biaya tambahan yang dikeluarkan entitas publik untuk menunjang pengungkapan tanggung jawab sosial karena memang belum mandatori. Entitas publik yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena entitas publik secara sukarela telah merasakan manfaat dari pelaporan keberlanjutannya dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. (Oktaviani & Amanah, 2019).

Alasan utama mengapa entitas publik perlu menerapkan laporan keberlanjutan, terutama entitas publik yang memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial yaitu untuk menunjukkan kepedulian entitas publik terhadap lingkungan dan sosial sekitarnya, untuk menetapkan kepercayaan *stakeholder* kepada entitas publik baik dari segi produk maupun kinerjanya serta nama baik entitas publik tidak hanya didasarkan atas kemampuan dalam menghasilkan laba dan produk yang berkualitas, namun entitas publik yang telah menerapkan laporan keberlanjutan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pengungkapan laporan keberlanjutan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas publik terhadap tindakan dan kebijakan yang berdampak pada ekonomi, lingkungan, sosial. Pengungkapan laporan keberlanjutan juga dapat meningkatkan nama baik entitas publik (Mahmut, et.al, 2022).

Kinerja keuangan adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami kondisi dan perkembangan keuangan suatu entitas publik serta mengetahui pencapaian apa yang telah dicapai entitas publik dalam waktu yang sudah lalu atau saat ini (Sari, 2021). Tujuan penilaian kinerja keuangan suatu entitas publik yaitu untuk melihat sejauh mana kemampuan entitas publik dalam melunasi seluruh hutangnya dengan tepat waktu dan bagaimana entitas publik mampu menghasilkan laba atau keuntungan yang cukup untuk menjaga operasi bisnisnya dari tahun ke tahun.

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh entitas publik untuk mengevaluasi kinerja keuangannya dengan cara membandingkan data di laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam suatu periode (Astutik, 2020). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas.

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu entitas publik dapat membayar semua kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan uang tunai atau aset yang dapat dijual dengan cepat (Darmawan, 2020). Rasio likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan *current ratio*. *Current ratio* adalah perbandingan antara aset yang dapat diubah menjadi uang dengan kewajiban yang segera harus dibayar oleh entitas publik (Darmawan, 2020).

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak asset dalam suatu entitas publik didanai dengan hutang atau pinjaman (Kasmir, 2016). Rasio *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah utang dengan modal. Semakin besar rasio utang terhadap modal maka semakin sedikit modal yang dimiliki entitas publik dibandingkan dengan jumlah hutangnya (Kariyoto, 2017).

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengindikasikan sejauh mana manajemen dapat mengakumulasi pendapatan yang memadai dari aset entitas publik yang digunakan

(Hidayat, 2018). Rasio aktivitas dalam penelitian ini diukur dengan *inventory turnover*. *Inventory turnover* adalah perbandingan yang digunakan untuk menghitung sejauh mana stok barang berputar dalam waktu satu tahun guna mencapai hasil penjualan yang maksimal (Siswanto, 2021).

Ukuran entitas publik adalah sebuah faktor yang diperhitungkan oleh para investor saat melakukan investasi. Semakin besar skala entitas publik maka semakin canggih teknologi dan sistem yang ada di dalamnya serta semakin mudah bagi manajemen untuk mengelola aset entitas publik. Hal ini akan mendorong peningkatan kinerja entitas publik (Wati, 2019).

Tata kelola entitas publik adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengawasi proses pengendalian bisnis yang berjalan terus – menerus untuk meningkatkan nilai saham, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai entitas publik dan bertanggung jawab kepada *shareholder* tanpa mengabaikan kepentingan pihak terkait seperti karyawan, kreditur dan masyarakat (Franita, 2018). Tata kelola entitas publik dalam penelitian ini diukur dengan komite audit. Komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu entitas publik yang diukur dengan cara menghitung seberapa banyak anggota komite audit yang disebutkan dalam laporan keuangan entitas publik. (Wahyuni, 2020)

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang disusun oleh suatu entitas publik untuk mengevaluasi, mengungkapkan dan menjelaskan usaha – usaha yang dilakukan oleh entitas publik tersebut guna menjadi entitas publik yang bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga kinerja entitas publik dapat dibawa menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sukoharsono & Wuryan, 2021; Wagenhofer, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis determinan pengungkapan keberlanjutan sebelum dan saat pandemi C19 pada entitas manufaktur periode 2017 dan 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Obyek penelitian adalah *current ratio*, *debt to equity ratio*, *inventory turnover*, ukuran entitas publik, komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Target populasi penelitian adalah entitas publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan aktif listing periode 2017 – 2022, lalu tehnik sampling yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*, dengan kriteria sampel tersaji pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2017 – 2022	178
2.	Perusahaan Manufaktur yang Tidak Lengkap Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan Selama Tahun 2017 – 2022.	(87)
3.	Perusahaan Manufaktur yang Tidak Lengkap Mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan Selama Tahun 2017 – 2022.	(47)
4.	Perusahaan Manufaktur yang Belum Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan Selama Tahun 2017 – 2022	(38)
<b>Jumlah sampel yang diteliti</b>		<b>6</b>
<b>Jumlah tahun yang diteliti</b>		<b>6</b>
<b>Jumlah data</b>		<b>36</b>

Sumber : Data diolah, (2023).

Unit analisis adalah data sekunder berupa laporan tahunan, yang memuat laporan keuangan dan laporan keberlanjutan tahun 2017 (efektif sukarela Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik) sd 2022. Sumber data tersebut diperoleh dari laman resmi masing – masing entitas publik manufaktur.

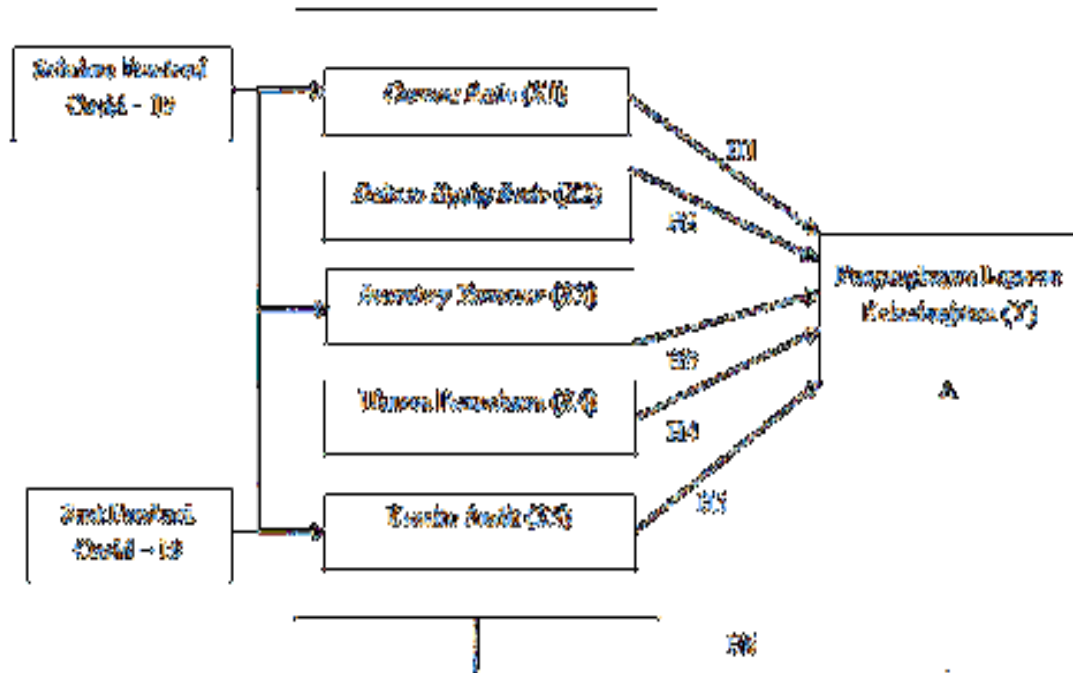
Selanjutnya Tabel 2 menyajikan variabel penelitian dan operasionalisasinya, nampak sebagai berikut.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Simbol	Definisi	Operasionalisasi	Skala Pengukuran
Control Size (CS)	Utama (2017)	CS = $\frac{\text{Jumlah Saham}}{\text{Jumlah Saham + Jumlah Obligasi}}$	Kuantitatif
Age of Firm (AF)	Komponen (2017)	AF = $\frac{\text{Jumlah Saham}}{\text{Jumlah Saham + Jumlah Obligasi}}$	Kuantitatif
Keuangan Tahunan (KT)	(Utama, 2017)	KT = $\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pendapatan + Biaya}}$	Kuantitatif
Ukuran Perusahaan (UP)	(Utama, 2017)	Jumlah Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif
Keuntungan Bersih (KB)	Utama (2017)	Jumlah Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif
Keberlanjutan (K)	Keberlanjutan dan Laporan Keberlanjutan (2017)	KB = $\frac{\text{Jumlah Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia}}{\text{Jumlah Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia}}$	Kuantitatif

Sumber : Data diolah, 2023.

Selanjutnya nampak disajikan paradigma penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada Gambar 2. Model Penelitian sebagai berikut ini.



Gambar 2. Model Penelitian

Selanjutnya data yang terkumpul, diolah dan dianalisa dengan Uji *paired sample t - test* dan uji hipotesis dengan analisa regresi data panel, mulai pengujian *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) dan dilanjutkan uji chow, uji hausman dan uji *lagrange multiplier*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas pada penelitian ini diperoleh rasio skewness 0,105, rasio kurtosis - 1,022 dan nilai *probability* sebesar 0,454059, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal; nilai yang diperoleh dari setiap variabel independen ini memiliki nilai residual kurang dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ditemukan hubungan antara variabel independen; nilai *prob chi square* sebesar 0,1441 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas; uji autokorelasi diperoleh *prob chi square* sebesar 0,0602 atau lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi. Akhirnya dapat dilanjutkan untuk analisis verifikatif.

### Uji Beda

Hasil uji nilai *sign probability* diperoleh pengungkapan laporan keberlanjutan adalah sebesar 0,0026 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengungkapan laporan keberlanjutan sebelum pandemi dengan pengungkapan laporan keberlanjutan saat pandemi covid - 19; sedangkan untuk variabel lainnya nilai

sign probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu rasio lancar (0,614), DER (0,861), inventory TOR (0,816), ukuran entitas (0,718), dan komite audit (0,788).

Secara empiris hal tersebut mengindikasikan bahwa sebelum pandemik entitas fokus jangka pendek untuk memaksimalkan kinerja keuangan khususnya laba, namun saat pandemi entitas publik masih fokus pada perkembangan keberlangsungan bisnisnya dan bagaimana mengelola keuangan dengan tepat dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dari penjualan dan pertemuan dilakukan secara daring selama pandemi, disamping entitas publik fokus untuk berkontribusi dalam membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan bantuan dana dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan vaksin covid - 19 dan bantuan sosial lainnya (kegiatan CSR).

### Regresi Data Panel

Hasil uji chow menunjukkan nilai *probability Cross-section Chi-square* sebesar 0,0015 maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM), sedangkan uji hausman juga menunjukkan nilai *probability Cross-section random* sebesar 0,0028 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM).

Selanjutnya dalam Tabel 3 disajikan hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) sebagai berikut.

**Tabel 3. Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.765174	0.457118	3.861530	0.0007
CR	-0.066597	0.100488	-0.662733	0.5136
DER	0.001253	0.000831	1.506968	0.1444
ITO	-0.112847	0.034184	-3.301195	0.0029
UK	0.020569	0.020779	0.989857	0.3317
KA	-0.163514	0.103540	-1.579236	0.1269
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.524691	Mean dependent var	0.675556	
Adjusted R-squared	0.334568	S.D. dependent var	0.156834	
S.E. of regression	0.127936	Akaike info criterion	-1.028111	
Sum squared resid	0.409188	Schwarz criterion	-0.544258	
Log likelihood	29.50600	Hannan-Quinn criter.	-0.859234	
F-statistic	2.759739	Durbin-Watson stat	1.871937	
Prob(F-statistic)	0.019200			

Sumber : *Output Eviews*, (2023).

Secara parsial nilai *probability* yang diperoleh variabel *current ratio* yaitu sebesar 0,5136 bukan determinan pengungkapan keberlanjutan. Hal ini disebabkan karena *current ratio* fokus pada likuiditas keuangan, dimana *current ratio* dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana entitas publik dapat memenuhi semua kewajibannya dengan tepat waktu dan *current ratio* tidak menunjukkan praktik – praktik entitas publik yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan seperti pengelolaan limbah atau upaya untuk mengurangi dampak lingkungan karena dalam kinerja entitas publik yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan perlu diukur dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan entitas publik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Rufinga, 2022) yang menyatakan bahwa secara parsial *current ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Hal ini menunjukkan bahwa *current ratio* fokus pada ekonomi entitas publik yang memberikan gambaran tentang kemampuan entitas publik dalam memenuhi semua kewajibannya dengan menggunakan asset yang dimilikinya. Sementara pengungkapan laporan keberlanjutan berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi serta ditunjukkan untuk pemangku kepentingan entitas publik yang lebih luas seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, dan lembaga keuangan yang ingin mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas entitas publik.

Selanjutnya, nilai *probability* yang diperoleh variabel *debt to equity ratio* yaitu sebesar 0,1444 maka dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* bukan determinan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Meutia & Farida, 2019), yang menyatakan bahwa secara parsial *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* fokus pada ekonomi entitas publik yang memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana entitas publik membiayai operasi bisnisnya dengan hutang dibandingkan dengan modal entitas publik. Serta *debt to equity ratio* merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi seperti *generally accepted accounting principles* (GAAP) atau *international financial reporting standards* (IFRS). Sementara pengungkapan laporan keberlanjutan memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini disusun berdasarkan standar *global reporting initiative* (GRI).

Nilai *probability* yang diperoleh variabel *inventory turnover* yaitu sebesar 0,0029 maka dapat disimpulkan bahwa *inventory turnover* adalah determinan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat *inventory turnover* rendah artinya entitas publik tidak menjual barang dengan cepat. Persediaan yang tidak berputar dengan cepat cenderung memerlukan pengemasan tambahan untuk melindungi barang selama penyimpanan jangka panjang sehingga hal ini dapat lebih banyak limbah plastik atau kemasan yang tidak ramah lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mujiani & Tuti, 2020) yang menyatakan bahwa secara parsial *inventory turnover* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya *inventory turnover* dapat mengakibatkan entitas publik memiliki stok barang yang berlebihan. Hal ini berarti entitas publik memproduksi atau memesan barang lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga Barang – barang yang disimpan dalam waktu yang lebih lama memiliki tingkat pemborosan lebih tinggi karena barang tersebut



mengalami kerusakan. Hal ini dapat mengakibatkan limbah menjadi meningkat serta pendapatan entitas publik mengalami penurunan karena entitas publik tidak dapat menjual barang dengan cepat.

Nilai *probability* yang diperoleh variabel ukuran entitas publik yaitu sebesar 0,3317 artinya nilai ukuran entitas publik lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ukuran entitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini disebabkan karena entitas publik dalam melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan tidak selalu berkaitan dengan ukuran entitas publik, akan tetapi lebih berkaitan dengan profil bisnis dan sektor industri tempat entitas publik beroperasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Meutia & Farida, 2019) yang menyatakan bahwa secara parsial ukuran entitas publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran entitas publik tidak selalu menjadi faktor dalam mengukur kesadaran entitas publik untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Entitas publik yang berukuran besar maupun kecil menyadari bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi entitas publik dan memperkuat hubungan dengan *stakeholder*.

Nilai *probability* yang diperoleh variabel komite audit yaitu sebesar 0,1269 artinya nilai komite audit lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini disebabkan karena komite audit lebih fokus pada aspek keuangan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kesehatan keuangan entitas publik. Sementara untuk laporan keberlanjutan berkaitan dengan aspek – aspek non keuangan seperti dampak sosial dan lingkungan. Komite audit ini biasanya terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang keuangan, audit dan akuntansi sehingga komite audit ini kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Yudhanti & Ela, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memberikan peluang untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan karena komite audit lebih fokus melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dari pada mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan.

Secara simultan nilai prob (F-statistic) sebesar 0,019 dan R square sebesar 0,524 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama (simultan) variabel *current ratio*, *debt to equity ratio*, *inventory turnover*, ukuran entitas publik dan komite audit memiliki pengaruh moderat (52,4%) terhadap variabel pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Budiarto et al., 2023; Rufinga, 2022; Mujiani & Tuti, 2020. Masih erdapat variabel lainnya sebagai determinan pengungkapan keberlanjutan (sebesar 66,6%), diduga adalah variabel makro dan mikro ekonomi ( Ali & Wilson, 2024).

## KESIMPULAN

*Current ratio*, *debt to equity ratio*, *inventory turnover*, ukuran entitas publik dan komite audit tidak terdapat perbedaan antara sebelum pandemi C19 dan saat pandemi C19 pada entitas publik sektor manufaktur di Indonesia. Sedangkan variabel

pengungkapan laporan keberlanjutan terdapat perbedaan antara sebelum pandemi C19 dan saat pandemi covid - 19 pada entitas publik sektor manufaktur di Indonesia. Secara parsial variabel *current ratio*, *debt to equity ratio*, ukuran entitas publik dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada entitas publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2022. Variabel *inventory turnover* secara parsial memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada entitas publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2022. Sedangkan secara simultan variabel *current ratio*, *debt to equity ratio*, *inventory turnover*, ukuran entitas publik dan komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada entitas publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2022.

Entitas publik diharapkan dalam membuat laporan keberlanjutan lebih memperhatikan standar *global reporting initiative* yang telah ditentukan untuk mengetahui dampak - dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan entitas publik seperti dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dan diharapkan untuk kedepannya semakin banyak entitas publik yang membuat laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja entitas publik pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Investor diharapkan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada entitas publik sebaiknya tidak hanya memperhatikan kondisi keuangan entitas publik, akan tetapi perlu memperhatikan juga pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan entitas publik sesuai dengan standar *global reporting initiative* yang digunakan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan dan meneliti sektor yang sebagian besar entitas publiknya mengungkapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan GRI *standards*. Serta menambah variabel independen yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti *debt to equity ratio*, *total asset turnover*, *return on asset*, *return on equity*, komisarisi independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali., Waris & Wilson., Jeffrey. (2024). Multi-level analysis on determinants of sustainability disclosure: a survey of academic literature. *Managerial Finance* Vol. 50 (1) 2024: 228-265. DOI 10.1108/MF-03-2023-0189
- Astutik, W. S. (2020). *Manajemen Investasi*. Malang : Media Nusa Creative.
- Budiarto, I. G. hutama, Muhamad, M., & Tri, U. L. (2023). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *E-Proceeding of Management*, 10(2), 1219-1225.
- Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, Laila M Pimada. (2020). Kontroversi dampak omnibus Law di Tengah Oandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan tenaga Kerja di Indonesia. *Muqodimah*, Vol 6(1);38-46.
- Damayanty, P., Dodi, W., & Nurmelia, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Firm Size Dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2),1-11. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.4998>
- Darmawan. (2020). *Dasar - dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Uny Press.

Franita, R. (2018). Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan : Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Hidayat, W. W. (2018). Dasar - Dasar Analisa Laporan Keuangan. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Kariyoto. (2017). Analisa Laporan Keuangan. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Kasmir: PT Raja Grafindo Persada.

Mahdi Salehi, Farzaneh Komeili, Ali Daemi Gah. (

Meutia, F., & Farida, T. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2017). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3543-3551.

Mujiani, S., & Tuti, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 18-35.

Oktaviani, D. R., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability Report. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1-20.

Priyatno, D. (2022). Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan Spss dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews. Yogyakarta: Cahaya Harapan.

Rufinga, S. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap sustainability reporting (Studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2021. *Prosiding Seminar Nasional*, 9, 7-12.

Sari, M. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance. Medan: UMSU Press.

Siswanto, E. (2021). Manajemen Keuangan Dasar. Malang: Universitas Negeri Malang.

Sukoharsono, E. G., & Wuryan, A. 2021. Akuntansi Keberlanjutan. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Supriadi, I.(2020). Metode Riset Akuntansi. Sidoarjo: Deepublish.

Tobing, R. A., Zuhrotun, Z., & Ruserlistyani, R. 2019. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 102-123. <https://doi.org/10.18196/rab.030139>

Wagenhofer., Alfred. (2023). Sustainability Reporting: A Financial Reporting Perspective. *Accounting in Europe*: 1-11; <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.221839>

Wahyuni, S. (2020). Kinerja Sharia Conformity and Profitability Index dan Faktor Determinan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Wati, L. N. (2019). Model Corporate Social Responsibility (CSR). Jawa Timur: Myria Publisher.

Yudhanti, A. L., & Ela, L. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pelaporan Pengungkapan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(2), 104-123.